KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : RUU Antiterorisme - DPR Janji Revisi Diselesaikan Mei
Tanggal : Sabtu, 19 Mei 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

RUU ANTITERORISME

DPR Janji Revisi Diselesaikan Mei

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menjamin pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan rampung Mei ini. Pasal yang telah disepakati DPR dan pemerintah sebelum ini tak akan dibahas ulang agar RUU cepat selesai.

"Percepatan penyelesaian RUU Antiterorisme penting untuk memberikan payung dan kepastian hukum dalam pemberantasan terorisme," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo saat membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Rapat pembahasan antara Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme DPR dan pemerintah akan berlangsung pada Rabu (23/5/2018). Ketua Pansus RUU Antiterorisme dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii mengatakan, rapat akan fokus membahas satu poin tersisa, definisi tindak pidana terorisme. "Pasal yang sudah disepakati dalam rapat sebelum ini, termasuk di antaranya Pasal 43J tentang pelibatan TNI, tak akan dibahas. Jadi cukup membahas definisi. Tinggal satu poin itu saja," kata Syafii.

klik.kompas.id/ruusah

Dari 10 fraksi di DPR, mayoritas cenderung menyetujui usulan bahwa suatu tindakan dapat disebut terorisme jika turut memenuhi unsur motif politik, ideologi, dan/atau ancaman terhadap keamanan negara. Namun, pemerintah dan fraksi masih perlu membahas letak pencantuman tambahan frasa tersebut.

Opsi yang berkembang ada dua, yaitu meletakkan tambahan frasa "motif politik, ideologi, dan/atau ancaman terhadap keamanan negara" di batang tubuh rancangan undang-undang (RUU) sebagai definisi terorisme, atau cukup mencantumkannya

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5)

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

DPR Janji Revisi Diselesaikan Mei

(Sambungan dari halaman 1)

di bagian penjelasan umum, di luar batang tubuh. Untuk mempercepat pembahasan, Bambang mendorong rapat antara pemerintah dan DPR digelar terbuka.

Keseriusan pemerintah

Pemerintah sangat serius mendorong pelibatan TNI dalam penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Kepastian mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI ditegaskan Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam acara buka bersama para pimpinan lembaga negara, anggota Kabinet Kerja, perwakilan tokoh agama, dan perwakilan pengusaha di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

"Pemerintah juga dalam proses membentuk komando pasukan khusus gabungan yang berasal dari Kopassus, Marinir, Paskhas, dalam rangka memberi rasa aman pada rakyat," ujar Presiden Jokowi.

Presiden menjelaskan, pasukan khusus dari tiga matra TNI itu akan dikerahkan pada kondisi mendesak. "Pasukan khusus gabungan itu diterjunkan apabila situasi sudah di luar kapasitas Polri," kata Jokowi. Artinya, Koopssusgab bekerja saat Kepala Polri menilai intensitas teror sudah tinggi. Namun, Presiden yang memiliki kewenangan memerintahkan gabungan pasukan elite TNI ini turun menangani terorisme.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, Koopssusgab direncanakan terdiri dari Detasemen Khusus 81 (Penanggulangan Teror/Gultor) Kopassus TNI AD, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) Marinir TNI AL, dan Detasemen Bravo (Denbravo) Pasukan Khas TNI AU.

Berkait aksi teroris yang beruntun di sejumlah daerah, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin meminta aparat keamanan mengusut tuntas pelakunya. Ma'ruf menyesalkan terjadinya aksi teroris itu sehingga penindakan tegas dibutuhkan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. "Saya mendukung penuh aparat keamanan, baik Polri, TNI, maupun BIN untuk segera menuntaskan kasus ini dan menindak para pelaku sesuai hukum yang berlaku," ujar Ma'ruf.

Pengajar Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, mengatakan, pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme hal yang lazim, mengingat kemampuan militer dari peringatan dini, penindakan, hingga pemulihan situasi. "Yang penting, bagaimana prosesnya sampai TNI dilibatkan menangani terorisme harus lewat keputusan politik negara," ujarnya.

(AGE/APA/NTA/INA/EDN/HAM)